

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM MENJAGA KETERSEDIAAN PUPUK BERSUBSIDI BAGI PETANI PADI DI KECAMATAN GUNUNG TULEH KABUPATEN PASAMAN BARAT

Zulfahmi^{1,*}, Fitri Eriyanti²,

Abstract

This research aims to assess the effectiveness of the evaluation of the implementation of fertilizer subsidy policies for rice farmers in Gunung Tuleh District, West Pasaman Regency. The background of this research is the suboptimal distribution of subsidized fertilizers and the limited availability of fertilizers for farmers. This study was conducted using a qualitative approach, employing data collection techniques through interviews and document analysis. The results indicate that the implementation of the subsidized fertilizer distribution policy in Gunung Tuleh District, West Pasaman Regency, is proceeding well. It starts from the arrival of fertilizers from companies to the Regency/City, which are handed over to distributors and retailers who sell them to farmers' groups, and this process is done effectively. The implementation of the subsidized fertilizer distribution policy in Gunung Tuleh District, West Pasaman Regency, has been effective, as the distribution of subsidized fertilizers to farmers and farmers' groups meets their needs.

Keywords: *Implementation, Policy, Availability, Subsidized Fertilizer*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas evaluasi pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk bagi petani padi di Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat. Latar belakang dari penelitian ini penyaluran pupuk subsidi yang belum optimal dan terbatasnya ketersediaan pupuk untuk para petani. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan analisis dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan Implementasi kebijakan penyaluran pupuk subsidi di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat sudah berjalan sesuai dengan baik. Dimulai dari pupuk yang datang dari perusahaan ke Kabupaten/Kota yang diserahkan ke distributor serta pengecer yang menjual kepada para kelompok-kelompok tani sudah baik. Pelaksanaan kebijakan penyaluran pupuk subsidi di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat sudah efektif. Karena penyaluran pupuk subsidi kepada para petani dan kelompok tani sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.

Kata Kunci: *Implementas, Kebijakan, Ketersediaan, Pupuk Subsidi*

PENDAHULUAN

Pupuk memiliki peran penting dalam meningkatkan hasil pertanian, mendorong produktivitas, meningkatkan pendapatan petani, serta berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, pemerintah sangat *concern* dalam mengelola pengadaan dan pendistribusian pupuk kepada petani. Untuk mendorong petani menggunakan pupuk dalam jumlah yang memadai, pemerintah telah memberikan subsidi sebagai salah satu instrumen kebijakan utama. Subsidi pupuk diberlakukan sebagai upaya untuk menanggapi kondisi mayoritas petani di Indonesia, yang umumnya merupakan petani kecil dengan keterbatasan modal dalam mengelola usaha pertanian mereka.

Dalam kondisi tersebut, subsidi pupuk berperan sebagai instrumen kebijakan publik yang sangat penting dalam meningkatkan kapasitas produksi para petani. Pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk telah dilakukan secara komprehensif, mencakup tahapan perencanaan, penetapan harga eceran tertinggi, penentuan jumlah subsidi, mekanisme distribusi kepada kelompok petani sasaran, serta proses pengawasan. Meskipun kebijakan tersebut telah diterapkan, ketersediaan pupuk di tingkat petani masih belum sepenuhnya terjamin (ICASEPS, 2006 dan 2008). Ketidakakuratan dalam perencanaan jumlah kebutuhan pupuk serta pengawasan yang belum optimal menyebabkan distribusi pupuk bersubsidi tidak mencapai sasaran. Menurut laporan, petani dengan lahan kurang dari 0,5 hektar hanya menerima 40 persen dari total subsidi yang tersedia, sementara sebagian besar petani (90%) terpaksa membeli pupuk bersubsidi dengan harga yang melebihi harga eceran tertinggi.

Subsidi yang semestinya telah lama diakui oleh para ekonom sebagai alat yang berpotensi berguna ketika manfaat bagi masyarakat (Jayne, Mason, Burke, & Ariga, 2018). Tujuan dari program subsidi adalah untuk mencegah penurunan lebih lanjut dalam penggunaan pupuk (Yawson, Armah, Afrifa, & Dadzie, 2010). Selain berhadapan dengan rendahnya pendapatan yang diperoleh petani, sektor pertanian juga mengalami penurunan produksi dan hasil panen. Masalah ini menjadi salah satu tantangan utama yang diharapkan dapat diselesaikan melalui kebijakan subsidi pupuk (Weerahewa, Kodithuwakku, & Ariwardana, 2010). Kesulitan dalam meningkatkan hasil pertanian sangat erat kaitannya dengan kurangnya perhatian terhadap tingkat kesuburan lahan dan ketersediaan pupuk organik.

Subsidi yang semestinya telah lama diakui oleh para ekonom sebagai alat yang berpotensi berguna ketika manfaat bagi masyarakat (Jayne, Mason, Burke, & Ariga, 2018). Tujuan dari program subsidi adalah untuk mencegah penurunan lebih lanjut dalam penggunaan pupuk (Yawson, Armah, Afrifa, & Dadzie, 2010). Selain berhadapan dengan rendahnya pendapatan yang diperoleh petani, sektor pertanian juga mengalami penurunan produksi dan hasil panen. Masalah ini menjadi salah satu tantangan utama yang diharapkan dapat diselesaikan melalui kebijakan subsidi pupuk (Weerahewa, Kodithuwakku, & Ariwardana, 2010). Kesulitan dalam meningkatkan hasil pertanian sangat erat kaitannya dengan kurangnya perhatian terhadap tingkat kesuburan lahan dan ketersediaan pupuk organik.

Dalam rangka mendukung pengembangan produksi petani padi dan meningkatkan daya saing produksi padi skala global, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait, seperti kebijakan subsidi pupuk. Pelaksanaan subsidi pupuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Pemerintah menetapkan kebijakan ini dengan tujuan memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bersubsidi, sekaligus mengoptimalkan distribusinya agar dapat menjangkau petani secara lebih efektif.

Di Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, produksi padi mengalami penurunan yang signifikan, yang bertepatan dengan terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi. Menurut data BPS Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan bahwa hasil panen padi periode Januari-April 2022 hanya mencapai 43.011 ton dari target 117.343 ton. Komoditas padi merupakan salah satu sumber primer penghasilan masyarakat Pasaman Barat. Data produksi padi pada tahun 2021 sebanyak 85 ribu ton dari 130 ributon yang ditargetkan. Jika dibandingkan secara persentase, data di atas menunjukkan penurunan yang signifikan, di mana pada tahun 2021 angka capaian berada pada 63%, sedangkan tahun ini hanya mencapai 36% (BPS Pasaman Barat, 2022). Kondisi ini yang kemudian menunjukkan pentingnya perhatian khusus berbasis akademis terhadap komoditas tersebut mengenai penerapan kebijakan yang berpihak pada petani padi dan mendukung minat petani dalam meningkatkan hasil pertaniannya. Sama seperti pemanfaatan benih berkualitas, fokus utama petani masih pada pengurangan biaya produksi, bukan pada optimalisasi

keuntungan (Mardianto, Antoni & Effendy, 2016). Selain itu, tingkat teknologi pemupukan yang digunakan oleh petani masih tergolong rendah, baik akibat keterbatasan modal maupun ketersediaan pupuk yang tidak selalu mencukupi saat dibutuhkan. Oleh karena itu, kebijakan subsidi pupuk yang diberikan oleh pemerintah perlu dikaji lebih lanjut guna meningkatkan hasil pertanian serta kesejahteraan petani, khususnya di Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini berkaitan dengan kondisi di lapangan, di mana petani padi sering mengeluhkan keterbatasan ketersediaan pupuk bersubsidi. Akibatnya, mereka terpaksa menggunakan pupuk non-subsidi yang memiliki harga jauh lebih tinggi dibandingkan pupuk bersubsidi.

Menurut Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat, Edrizal, pada tahun 2021 kebutuhan pupuk jenis urea berdasarkan RDKK untuk wilayah Pasaman Barat mencapai 47.150 ton per tahun, namun alokasi yang diberikan hanya 2.560 ton per tahun. Begitu pula dengan pupuk SP36, yang membutuhkan 12.850 ton per tahun tetapi hanya mendapat alokasi 2.880 ton. Pupuk ZA dengan kebutuhan 38.200 ton per tahun hanya memperoleh 1.851 ton, sementara pupuk NPK yang diperlukan sebanyak 98.300 ton per tahun hanya dialokasikan 1.812 ton. Ia juga menekankan bahwa subsidi pupuk merupakan tantangan berskala nasional, dengan kebutuhan pupuk bersubsidi di Indonesia yang mencapai 23 juta ton per tahun, sementara ketersediaan yang tersedia hanya sekitar 9 juta ton per tahun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi atau situasi di

lapangan secara objektif tanpa melakukan perubahan terhadap objek penelitian. Pendekatan ini dilakukan secara sistematis dan akurat, sesuai dengan fakta serta keadaan sebenarnya di lapangan. Penerapan metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data dari beragam sumber, seperti wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, serta dokumentasi resmi, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai subjek penelitiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan ini diterapkan dengan tujuan untuk memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani padi di Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.

Ketersediaan barang berfungsi sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan perubahan permintaan yang dapat terjadi sewaktu-waktu akibat perubahan kebutuhan pelanggan. Selain itu, ketersediaan barang turut meningkatkan nilai penjual dalam hal kelengkapan produk yang ditawarkan.

Berdasarkan Dunn (dalam Gustiance, 2019), evaluasi dapat dipahami sebagai proses estimasi yang menetapkan angka dan nilai tertentu secara spesifik. Evaluasi juga berhubungan dengan pengumpulan informasi terkait nilai atau manfaat suatu kebijakan, dengan tujuan menghadirkan data yang akurat mengenai efektivitas implementasi atau regulasi yang berlaku (Dunn, 2003). Ciri-ciri dalam mengevaluasi kebijakan suatu program dilihat sebagai berikut :

1. Perataan

Perataan dalam konteks ini merujuk pada manfaat dan biaya dari suatu kegiatan yang terkait dengan program, serta memastikan bahwa elemen dalam program telah didistribusikan secara proporsional kepada semua pihak yang terlibat. Sementara itu, kecukupan mengacu pada pemenuhan kebutuhan yang memberikan kepuasan terhadap keinginan tertentu. Selain itu,

kecukupan juga dapat dipahami sebagai upaya untuk menilai suatu kebijakan dalam mencapai tujuan serta memberikan manfaat yang optimal bagi target yang ditentukan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasinya sudah bagus dan merata, setiap para petani selalu mendapatkan pupuk subsidi sesuai dengan kebutuhannya. Ini dilakukan dengan merata ke seluruh petani agar tidak ada kesenjangan sosial diantara masing-masing petani. Dengan pelaksanaannya yang baik dapat mengakibatkan ketersediaan pupuk di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat tidak kekurangan untuk para petani padi, karena kebutuhan setiap para petani sudah terpenuhi dan mendapatkan jumlah pupuk sesuai dengan jumlah yang diajukan.

Dalam hal pembagian jumlah pupuk yang boleh di berikan oleh para pengecer kepada petani juga diatur dan diawasi agar tidak terjadi kecurangan baik petani maupun para pengecer dengan itu maka pembagian pupuk subsidi menjadi merata sehingga ketersediaan pupuk subsidi untuk para petani padi terakomodir.

2. Kecukupan

Kecukupan dapat dimaknai sebagai pemenuhan suatu kebutuhan yang menghasilkan rasa puas terhadap berbagai hal yang diharapkan atau diinginkan. Selain itu, kecukupan dapat diartikan sebagai upaya untuk menilai suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, serta memastikan bahwa manfaat atau kegunaan yang diberikan kepada target bersifat optimal.

Hasil penelitian dalam masalah untuk menjaga ketersediaan pupuk juga mendapatkan rasa puas bagi para petani. Setiap kebutuhan petani terpenuhi, sementara para pelaksana bijaksana dalam memastikan ketersediaan pupuk serta mendistribusikannya secara tepat sesuai dengan kebutuhan petani. Dengan

tercukupinya persediaan pupuk subsidi tidak ada lagi kekhawatiran masyarakat atau petani – petani untuk mendapatkan pupuk subsidi karena persediaan pupuk subsidi terpenuhi sesuai yang diinginkan.

KESIMPULAN

Dalam menjaga ketersediaan pupuk sangat mencukupi. Karena stok pupuk subsidi sesuai dengan hasil penyusunan RDKK di kelompok-kelompok tani, maka dai itu para petani tercukupi dengan jumlah atau persediaan yang ada. Kemudian di setiap kios-kios banyak untuk persediaan jika para petani membutuhkan. Permasalahan dalam memastikan ketersediaan pupuk di Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat tetap stabil dan terjaga dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed,3, Cet,2 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)., halm. 143.*
- Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* (Bandung: CV Alfabeta, 2008). halm. 34.
- Edward III George C, *Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London England Goggin, Malcolm L et al. 1990, 1.*
- Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gava Media, 2012)., halm. 20.
- Guntur Setiawan, *Implemtasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), halm. 39.
- Hariani, N. J. (2017). *Evaluasi kinerja kebijakan kesehatan ibu dan anak (Studi evaluasi Policy Output dan Policy Outcome Program Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS) di Kabupaten Sidoarjo).* Kebijakan dan Menejemen Publik, 5(3), 1–13.
- Iga Rosalina, —*Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan,* Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, 01.No. 01 (2014), halm. 3.
- Lukito, I. (2016). *Implementasi Kebijakan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Layanan Publik Kementerian Hukum dan HAM.* Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 10 (3), 243-256.
- Mardianto, Antoni, D., & Effendy, I. (2016). *Evaluasi Implementasi Enterprise Resources Planning Terhadap Kepuasan Distributor Menggunakan Model End User Computing Satisfaction* (Studi Kasus: PT Pusri Palembang). Bina Darma Conference on Computer Science, 2339-2347.
- Mazmanian Daniel A and Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy, Scott Foresman and Company, USA, 1983, 139.*
- Moloeng, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: CV. RemajaNawawi, Hadari. 2005. *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Gajahmada university Press.
- Mulyadi, 2015, *Implementasi Organisasi,* Yogyakarta, Gadjah Mada Univercity Press.

Pengaturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011, Pasal 2.‖

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 dan perubahannya melalui Permendag Nomor 07/M- DAG/PER/6/2009.‖

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
https://jdih.pertanian.go.id/fp/detail_peraturan/aturan/1029.

Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991, 21

Rahayu Kusuma Dewi, *Studi Analisis Kebijakan* (Jakarta: Pustaka Setia, 2016). Halm. 15

Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004). halm. 266.

Tahir, Arifin . 2014 : *kebijakan Publik Transparansi Penyelenggaraan pemerintah daerah*. Bandung : Alfabeta

Tri Wibowo, —*Dinamika Ketahanan Pangan Dan Kesejahteraan Petani*,‖ in *Dinamika Kebijakan : Subsidi Pupuk & Ketahanan Pangan*, ed. oleh Rofyanto Kurniawan dan Tri Wibowo (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017), hal. 211.